

AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA: STUDI ATAS GAGASAN NURCHOLIS MADJID

¹Jian Afira, ²Saude, ³Ismail
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
Corresponden Author: jianafira@gmail.com

Abstract

The focus of this research is Nurcholis Madjid's thoughts on the actualization of Pancasila values. This theme was chosen as a response to the ongoing discussion about Pancasila. Among the themes discussed, of course, is how to interpret and actualize Pancasila values today. The researcher chose Nurcholis Madjid's thoughts to be studied because throughout his life this scholar from Jombang discussed a lot about Indonesia, democracy, and Pancasila. In this research, researchers used a sociological approach and critical philosophy. As a result, besides Nurcholis Madjid succeeding in showing the correlation between Islam and Pancasila values, he also succeeded in formulating how Pancasila is positioned as an epistemology of action, such as in terms of democracy, humanity, tolerance, justice, and social care.

Keywords: *Moral values, democracy, tolerance, hard work.*

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah pemikiran Nurcholis Madjid tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Tema ini dipilih sebagai respons atas menggeliatnya diskusi tentang Pancasila belakangan ini. Di antara tema yang diperbincangkan, tentu saja, soal bagaimana memaknai dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila pada masa kini. Peneliti memilih pemikiran Nurcholis Madjid untuk dikaji karena sepanjang hidupnya cendekiawan asal Jombang ini banyak membahas tentang keindonesia, demokrasi, dan Pancasila. Dalam riset ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis dan filsafat kritis. Hasilnya, selain Nurcholis Madjid berhasil menunjukkan korelasi antara Islam dan nilai-nilai Pancasila, juga berhasil merumuskan bagaimana Pancasila diposisikan sebagai epistemologi tindakan, seperti dalam hal demokrasi, kemanusiaan, toleransi, keadilan, dan kepedulian sosial.

Kata Kunci: *Nilai moral, demokrasi, toleransi, kerja keras.*

PENDAHULUAN

Pancasila, sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia, mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pijakan dalam pembangunan masyarakat yang adil dan beradab. Selama berpuluh-puluh tahun, Pancasila telah menjadi landasan bagi keragaman budaya, agama, dan suku di Indonesia, menjadikannya sebagai satu kesatuan yang

kuat dan menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Dalam proses aktualisasi nilai-nilai Pancasila, terdapat pemikiran yang kaya dan inspiratif dari tokoh intelektual Indonesia, salah satunya adalah Nurcholish Madjid.

Nurcholish Madjid, atau yang akrab disapa Cak Nur, merupakan seorang intelektual Muslim yang dikenal karena kontribusinya dalam mempromosikan pemahaman yang inklusif dan toleran tentang agama di Indonesia. Beliau adalah seorang sarjana agama yang memiliki wawasan yang mendalam dalam bidang filsafat, teologi, dan sosial. Cak Nur juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang berupaya mendorong aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai pijakan dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa.

Dalam pemikirannya, Nurcholish Madjid menekankan pentingnya menggali kembali makna dan relevansi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan yang semakin dinamis dan kompleks. Baginya, Pancasila bukanlah sekadar dokumen statis, melainkan sebuah landasan yang harus senantiasa diaplikasikan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Salah satu konsep sentral dalam pemikiran Cak Nur adalah "Islam yang Rahmatan Lil 'Alamin" atau "Islam sebagai Rahmat bagi Semesta Alam". Dalam pandangan ini, Cak Nur menggambarkan bagaimana nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, demokrasi, dan kerukunan, dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlandaskan pada kasih sayang, kebaikan, dan toleransi. Menurutnya, Pancasila dan Islam dapat saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain, menciptakan keselarasan antara kepentingan agama dan kepentingan bangsa.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila menurut Nurcholish Madjid juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis dan bermartabat. Beliau menekankan perlunya mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat serta menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua elemen masyarakat. Cak Nur juga menyoroti pentingnya pendidikan yang berkualitas dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, agar generasi muda Indonesia dapat mengembangkan pemahaman yang kokoh tentang toleransi, persatuan, dan semangat kebangsaan.

Dalam era kemajuan teknologi dan globalisasi seperti sekarang ini, pemikiran Nurcholish Madjid tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila sangat relevan dan mendesak. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan semakin kompleks, termasuk adanya polarisasi dan konflik sosial yang timbul dari perbedaan pandangan dan kepentingan. Oleh karena itu, menggali pemikiran Cak Nur tentang nilai-nilai Pancasila dapat memberikan inspirasi dan arahan bagi kita semua untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan berbangsa yang lebih baik.

Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi lebih jauh tentang konsep-konsep yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Melalui pemahaman yang mendalam tentang kontribusinya, diharapkan kita dapat mengambil pelajaran berharga dan memperkaya diskursus tentang kehidupan berbangsa yang inklusif, adil, dan harmonis.

PEMBAHASAN

A. Aktualisasi Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila Perspektif Nurcholis Madjid

Permasalahan-permasalahan yang kini sering dihadapi oleh manusia merupakan berbagai persoalan yang menyangkut dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Persoalan yang menyangkut dengan penindasan, ketimpangan sosial, serta ekonomi, merupakan bentuk-bentuk ketidakadilan. Permasalahan keadilan sosial adalah masalah ketimpangan yang akan menghilangkan keadaban dalam kehidupan manusia, dan akan mempengaruhi kehidupan umat.

Sejalan dengan pandangan Islam, Nurcholis Madjid menganggap bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang tertinggi, sebaik-baiknya ciptaan Tuhan, yang mana manusia diciptakan dari kejadian asalnya yang suci (fitrah), dan bernaluri kesucian (hanif), yang mengajarkan ajaran menghormati sesama manusia dalam semangat persamaan, keadaban (*civility*) dan keadilan.¹ Kesadaran akan keterbatasan diri sebagai makhluk lemah ciptaan Tuhan sangat diperlukan untuk mengembangkan sikap dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu, sikap kepada sesama manusia atas dasar pandangan yang menyeluruh dan seimbang dan memperhatikan segi-segi positif dan negative.

Nurcholis Madjid menjelaskan bahwa kehidupan yang seimbang (keadilan) terkandung pada isi teks kitab suci dalam istilah-istilah 'adl dan qitsh. Keadilan juga adalah ihsan, memiliki cita-cita berbuat baik untuk sesama manusia secara tulus dan damai. Tindakan-tindakan manusia dihadapan Allah sebagai saksi bagi-Nya. Inti dari kata 'adl dalam kitab suci menurut Nurcholis Madjid merupakan sikap seimbang serta adanya semangat moderasi dan toleransi yang dinyatakan dalam istilah wasath (pertengahan).²

Pancasila sebagai dasar negara dimulai dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dan diakhiri dengan tujuan pokok kehidupan kenegaraan, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Asas perikemanusiaan, persatuan dan kerakyatan berada dalam spektrum yang bermula dengan ketuhanan dan berujung dengan keadilan, sejalan dengan prinsip negara bangsa Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umum. Berkenaan dengan hal itu, suatu ironi besar telah terjadi pada negara kita, karena negara kita termasuk beberapa negara yang paling banyak menderita ketimpangan sosial di dunia. Penderitaan ketimpangan sosial itu adalah akibat melemahnya kesadaran cinta tanah air atau patriotisme, semangat mendahulukan dan membela kepentingan sendiri, rendahnya standar etika dan moral sosial yang mendorong sikap-sikap mementingkan diri dan golongan sendiri, tanpa memperdulikan kepentingan bangsa dan negara.

Ketimpangan sosial yang saat ini terjadi di Indonesia yaitu masalah krisis nasional yang berpangkal dari persoalan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Budaya KKN itulah yang pertama-tama menjadi sebab ketimpangan pembagian kembali kekayaan nasional pada tingkat pribadi, kelompok, maupun daerah. Keadilan sosial di Indonesia harus dimulai dengan adanya pemberantasan KKN itu

¹ Budhy Munawar Rahman, *Karya Lengkap Nurcholis Madjid*, (Cet. I, Jakarta: NCSM, 2019), xxviii

² Sulbi, "Islam Kemodernan dan Keadilan Sosial dalam Pandangan Nurcholis Madjid", *Journal of Social Religion Research*, Vol. 6, No. 1 (April 2021): 3.

secara total. Efek paling buruk meningkatnya korupsi ialah menyebarnya sikap sinis dalam kalangan masyarakat luas serta turunnya kemauan untuk bertahan melawan godaan menerima suap pada semua lapisan birokrasi. Karena sudah kompleksnya kenyataan tentang korupsi itu, dan sedemikian rusaknya dampak-dampak yang dihasilkan, maka menurut Mydral tiada jalan untuk memberantas korupsi selain daripada kemauan politik yang kuat dan keteladanan pemimpin. Pemerintahan yang bersih merupakan prasarana paling penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Sejalan dengan itu, fungsi pemerintahan ialah tanggung jawab mempertahankan nasib warga negara yang miskin, memelas, dan tak berdaya (*destitute*). Sebab masyarakat secara keseluruhan mempunyai kewajiban untuk menjamin kesejahteraan para anggotanya dan harus melindungi dari resiko tidak berdaya untuk melawannya.³

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mengakhiri krisis-krisis ketimpangan sosial persoalan budaya KKN itu, Nurcholis Madjid dalam bukunya "*Indonesia Kita*" menulis tentang perlunya mewujudkan *good governance* pada semua lapisan pengelolaan negara. Banyaknya krisis yang telah terjadi di negara kita ini terkait dengan masalah korupsi membuat hal tersebut sangat sulit untuk diberantas jika persoalan tersebut hanya dilakukan secara personal dan tidak menyeluruh. Pengelolaan yang baik dan benar (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan kekuasaan akan dapat menghilangkan budaya KKN tersebut. Dalam hal ini diperlukan kekuatan tekad yang besar untuk dapat menyeret persoalan-persoalan tersebut. Energi yang dihasilkan oleh tekad yang diperbarui dengan dukungan seluruh komponen bangsa itu akan menjadi efisien dan efektif serta terfokus kepada sasaran jika terbentuk jajaran pemimpin nasional yang sanggup memberi teladan, dan berdiri di barisan paling depan. Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan juga keterbukaan dalam proses penggunaan kekuasaan serta transparansi dalam semua proses sehingga tidak terjadi kegiatan kenegaraan yang berlangsung secara tersembunyi.⁴

Sudah lama karl Gunnar Mydral menilai negara kita sebagai "*soft state*", "*negara lunak*" yaitu negara yang pemerintahan dan warganya tidak memiliki ketegaran moral yang jelas, khususnya moral sosial-politik. Kita umumnya mengidap kelembekan (*leniency*), sikap serba memudahkan, sehingga tidak memiliki kepekaan cukup terhadap masalah penyelewengan dan kejahatan seperti korupsi, lebih-lebih korupsi dalam bentuk *conflict of interest*. Maka usaha menegakkan standar moral merupakan saah satu urgensi bagi bangsa kita. Sekali lagi standar moral inilah yang menyebabkan kita sekarang mengalami krisis multidimensional.⁵

Ketidakadilan di Indonesia saat ini juga dapat dilihat dari sistem pengadilan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Sistem hukum yang adil dapat dilihat dalam sistem pengadilannya. Melihat banyaknya kasus yang telah terjadi dimasyarakat saat ini yang memperlihatkan ketidakadilan tersebut, antara lain adalah putusan hakim yang dibuat secara tidak adil dengan pertimbangan yang berat sebelah karena hakim tidak memiliki waktu yang banyak dalam mendalami perkara, kemudian kasus yang

³ Budhy Munawar Rahman, *Karya Lengkap Nurcholis Madjid*, (Jakarta: NCSM, 2019).

⁴ Ibid, 4889.

⁵ Ibid, 4890

banyak terjadi adalah putusan hakim yang memberatkan kaum-kaum lemah karena tidak dapat membela diri akibat faktor ekonomi. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia harus bersikap adil dengan tidak pilih kasih dan tidak memandang jabatan, status ataupun pangkat seseorang. Perintah untuk menetapkan hukum secara adil dijelaskan dalam Q.S An-Nisaa'/4:58.

إِنَّ أَلَّا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْمَآثَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ أَلَّا نِعْمًا يُعْظَمُ بِهِ ۚ إِنَّ أَلَّا كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Terjemahnya:

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya secara adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat".

Sementara itu, ketegasan didalam prinsip menegakkan keadilan, dijelaskan oleh Allah dalam surah al-Hadid/57:25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ أَلَّا مَنْ يَنْصُرُهُ
وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ أَلَّا قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahnya:

"Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul Kami, dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama-Nya) dan rasul-rasul-Nya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa".

Secara khusus, ayat diatas mengandung kata *al-mizan* yang berarti seimbang atau keadilan. Pesan inti ayat diatas adalah bahwa segala bentuk hukum dan keadilan haruslah ditegakkan dengan cara apapun, jika perlu dengan paksa dan kekerasan, agar yang bersalah dan yang batil harus menerima akibatnya berupa sanksi, sedangkan yang benar dapat menerima haknya.

Pelaksanaan *good governance* diharapkan akan mendorong pelaksanaan asas hukum dan keadilan secara tegas dan teguh. Sebaliknya, tanpa tegaknya asas hukum dan keadilan, pelaksanaan *good governance* akan mustahil. Melemahnya kesadaran arah dan tujuan hidup bernegara yang menggejala saat ini berdampak sangat negatif kepada usaha-usaha penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Karena beroperasinya praktik suap menyuap itu, masyarakat semakin banyak kehilangan kepercayaan kepada proses-proses penegakan hukum dan keadilan oleh aparat-aparat yang bersangkutan. Lepas dari benar tidaknya sinyalemen dalam masyarakat tentang dunia peradilan kita yang telah terjerat oleh jaringan penyimpangan dan manipulasi hukum terorganisasi (semacam *organized crime*), segi penegakan hukum memang

merupakan titik paling rawan dalam kehidupan kenegaraan kita.⁶

Beberapa tahun belakangan ini, hukum di Indonesia semakin parah saja. Hukum seakan-akan bukan lagi dasar bagi bangsa Indonesia. Sehingga ada pengakuan informal dimasyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli, maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara adil dan menyeluruh. Oleh karena itu marilah kita bangun hukum yang sebanar-benarnya, seadil-adilnya agar tidak ada rakyat yang mengatakan bahwa hukum tajam kebawah dan tumpul keatas, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara kalangan para pejabat dengan rakyat.

Selanjutnya Cak Nur menjelaskan bahwa keadilan sosial merupakan suatu cita-cita dalam masalah ekonomi. Menurut Cak Nur diperlukan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat dalam kewajiban untuk tolong menolong golongan tidak mampu (kaum tertindas) yang biasa disebut bentuk formal dalam kewajiban membayar zakat.⁷ Dengan zakat, Islam tidak menghendaki kepemilikan pribadi (individualisme) dan kepemilikan kolektif (sosialisme). Untuk itu perlu ada keseimbangan bahwa kepemilikan pribadi tidak akan merusak kepentingan masyarakat, dan sebaliknya kepentingan masyarakat tidak mengabaikan kepemilikan pribadi. Islam menghendaki kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan pribadi. Hal itu merupakan makna adanya hak-hak fakir, miskin, dan orang tidak mampu dalam harta orang-orang kaya.⁸

Al-Qur'an menyebutkan bahwa harta kekayaan adalah titipan Tuhan, yang dikuasakan kepada penerimanya agar dipergunakan untuk semua anggota masyarakat atau kepentingan umum. Orang-orang yang mempergunakan harta kekayaannya (sendiri) untuk kepentingan dirinya sendiri dalam kehidupan yang mewah adalah orang yang sangat rendah. Sebaliknya, juga terkutuk orang-orang menyimpan rapat harta kekayaannya, sehingga kehilangan fungsi sosialnya.⁹

Cak Nur menyoroti masalah ekonomi yang tidak menunjang, apalagi yang menghalangi terwujudnya keadilan sosial dikutuk dengan keras, bahkan tidak ada kutukan kitab suci yang lebih keras daripada kutukan kepada pelaku ekonomi yang tidak adil, tidak produktif dan egois¹⁰. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S At-Taubah/9:34-35.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخَبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَمْ يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَكْنِزُونَ ۚ

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۚ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۚ

Terjemahnya:

⁶ Nurcholis Madjid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: Paraamadina, 2004).

⁷ Sofian Syah, "Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Raden Intan, Lampung, 2019), 69.

⁸ Wiwin, Makna Simbolik Zakat dalam Prespektif Nurcholis Madjid, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 9, No. 3 (2016), 510.

⁹ Ibid, 509-510.

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menginfakkan di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih, dan (ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam Neraka Jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, "inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".

Menurut Nurcholis Madjid untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil "tidak ada penindasan oleh manusia atas manusia", dan yang bersemangat kerakyatan, diperlukan kebesaran tekad dan keteguhan jiwa yang luar biasa. Perjuangan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, yaitu taraf hidup mereka yang terbelenggu oleh kemiskinan.¹⁰

Kemiskinan saat ini menjadi masalah besar karena merupakan wajah lain dari ketidakadilan sosial dan menjadi ciri khas golongan-golongan tertentu.¹¹ Kemiskinan merongsong martabat manusia karena kebutuhan dasar mereka yang miskin sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat tidak terpenuhi. Kemiskinan juga menyebabkan ketergantungan total kaum miskin dari kemauan orang atau golongan lain.¹²

Keimiskinan akan menyeret manusia kepada sikap-sikap mengingkari kebenaran. Kemiskinan akan membuat manusia terhalang dari usaha-usaha peningkatan dirinya menuju kepada harkat dan martabat kemanusiaannya yang lebih tinggi. Kemiskinan dan kemelaratan membuat seseorang lebih terpusat kepada usaha-usaha mempertahankan hidup jasmaninya, sehingga kemiskinan dan kemelaratan membuat terhalang dari perhatian kepada tingkat kehidupan yang lebih mulia, yaitu kehidupan ruhani.

Berdasarkan pandangan Nurcholis Madjid tersebut memberantas kemiskinan dengan meningkatkan taraf hidup kaum miskin adalah bagian tidak langsung dari kesertaan membimbing mereka kearah tingkat hidup yang lebih tinggi, lebih fitri, dan lebih mendekat kepada harkat dan martabat manusia, sejalan dengan rencana agung ilahi. Dengan demikian, mengusahakan dan memperjuangkan perbaikan hidup ilahi adalah bagian yang tak terpisahkan dari usaha peningkatan hidup ruhani. Dan jika benar bahwa kemelaratan dapat menjadi penghalang dari kemampuan menghayati kehidupan yang lebih tinggi, dan lebih mampu menerima serta meresapi kebenaran, maka sebaliknya dapat pula diharapkan bahwa kemakmuran dapat memberi kesempatan lebih baik untuk meningkatkan seseorang kepada dataran hidup yang lebih tinggi, yang lebih mendekati ridho ilahi. Dengan demikian, setiap usaha dan perjuangan meningkatkan taraf hidup sesama manusia juga berarti usaha dan perjuangan mengantarkan manusia kepada sesuatu yang lebih bermakna dan

¹⁰ Budhy Munawar Rahman, *Karya Lengkap Nurcholis Madjid*, (Jakarta: NCSM, 2019), 160.

¹¹ Nurcholis Madjid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: Paraamadina, 2004).

¹² Urbanus Ura Weruin, Keadilan Sosial dan Demokrasi, *Jurna Hukum*, Vol. 3, No. 12 (1997).

lebih memenuhi rasa tujuan hidup yang mendalam dan hakiki.¹³

Untuk mewujudkan keadilan sosial perlu ketegasan memperhatikan hidup rakyat secara nyata. Untuk itu pembangunan ekonomi harus diubah karena membuka kerawanan terhadap kedaulatan rakyat dengan memperhatikan potensi sumber daya yang melimpah di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam seharusnya tidak bergantung pada pihak asing yang akan mengganggu kedaulatan bangsa. Kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dikelola untuk mensejahterahkan rakyat Indonesia bukan untuk diserahkan kepada pihak asing.¹⁴

Demokrasi ataupun keadilan akan terwujud jika dalam masyarakat itu terdapat pemberian kesempatan yang sama untuk semua anggota atau warga negara. Salah satu kesempatan itu yang terpenting, karena paling luas dan kuat efeknya, ialah pendidikan. Maka sebelum yang lain-lain, dalam suatu masyarakat yang adil dan demokratis terlebih dahulu harus ada keadilan dan demokrasi dalam pendidikan.¹⁵

Menurut Nurcholis Madjid pendidikan juga merupakan sarana yang paling penting untuk meratakan dan menyamakan tingkat mutu sumber daya bangsa, oleh sebab itu diperlukan kebijakan dari pemerintah untuk memberi perhatian yang lebih kepada daerah-daerah terpencil dan terisolasi dalam usaha pemerataan pendidikan nasional.¹⁶ Dengan aktualisasi keadilan sosial diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan fasilitas pendidikan yang layak kepada daerah-daerah terpencil yang masih minim akan pengetahuan layaknya seperti pendidikan-pendidikan yang ada di kota besar. Agar rakyat Indonesia baik yang ada di daerah terpencil maupun di kota besar sama-sama merasakan keadilan dalam bidang pendidikan.

Perataan beban dan kesempatan disegala bidang, pada individu-individu dan kelompok-kelompok anggota bangsa, merupakan salah satu wujud nyata ide tentang keadilan sosial, sehingga bisa disebut sebagai salah satu wujud langsung tujuan kita bernegara. Pada masa Orde Baru, dengan segala kekurangannya yang serius ataupun yang ringan, menunjukkan kemungkinan diwujudkannya cita-cita perataan beban dan kesempatan itu. Jika tidak dalam politik pluralisme terbatas terasa menjadi penghalang, dan jika tidak dalam bidang ekonomi (pragmatisme ekonomi tidak terlalu menonjang), perataan itu cukup terasa dalam bidang pendidikan.¹⁷

Dengan aktualisasi keadilan sosial diharapkan Pemerintah dan masyarakat dapat mengelolah kekayaan Indonesia untuk kemakmuran rakyat, memberi kesempatan bagi seluruh rakyat untuk mengembangkan dirinya melalui akses pendidikan. Mengembangkan semangat tolong menolong dengan membantu kaum yang lemah dan golongan kecil.

Tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat, kita semua telah mengetahui kedudukan cita-cita itu pada kehidupan bernegara kita. Itu merupakan sumber tujuan yang sebenarnya Republik yang merdeka ini, dan merupakan sumber semangat bagi

¹³ Budhy Munawar Rahman, *Karya Lengkap Nurcholis Madjid*, (Jakarta: NCSM, 2019), 4621-4622.

¹⁴ Nurcholis Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1999), 198.¹⁵

¹⁵ Budhy Munawar Rahman, *Karya Lengkap Nurcholis Madjid*, (Jakarta: NCSM, 2019), 1352.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Budhy Munawar Rahman, *Karya Lengkap Nurcholis Madjid*, (Jakarta: NCSM, 2019), 93-94.

mereka yang hendak berderma kepada rakyat. Sebagai cita-cita resmi yang terkandung dalam konstitusi, maka yang pertama kali berkewajiban mengembangkannya ialah pemerintah beserta semua unsurnya.

Sila kelima yang berbunyi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" merupakan ideologi serta ketetapan paten dimana negara adalah salah satu media terpenting dalam mewujudkan cita-cita Pancasila tersebut, undang-undang tentang masalah kekayaan alam, hak milik, dan pemerataan haruslah menjadi prioritas utama pemerintah dalam mengimplementasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁸

Dengan keadilan, peradaban yang kukuh bisa terwujud, sebab keadilan adalah dasar moral yang kuat bagi semua pembangunan peradaban manusia sepanjang sejarah. Sebaliknya, tiadanya keadilan akan selalu menjadi ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa dan masyarakat.

B. Nilai-nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila

Setiap warga negara harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, wujud dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Sila ini mempunyai makna bahwa setiap warga negara mendapatkan keadilan tidak ada perbedaan antara manusia satu dengan yang lain, tujuannya ialah untuk mendapatkan masyarakat yang adil dan makmur. Nilai-nilai sila kelima menurut Nurcholis Madjid dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bersikap adil dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

Dalam hal ini masyarakat dapat merasakan keadilan dengan kebebasan menyampaikan pendapat, tidak pilih kasih, dan memberikan setaip orang yang berhak sebagaimana yang layak didapatkannya. Dan ini dapat dikaitkan dengan berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, kebudayaan, akademik dan hukum.¹⁹ Kewajiban yang harus dilakukan adalah berhubungan baik dengan sesama manusia.

2. Suka bekerja keras

Untuk berusaha semaksimal mungkin dan tidak hanya pasrah pada takdir, sebagai manusia yang bertaqwa kepada Tuhan, diwajibkan berusaha diiringi doa. Untuk menjaga cara kerja yang konsisten dan rajin serta mewujudkan tujuan-tujuan produksi jangka panjang terciptalah kerja keras dan produktif menjadi sumber penghargaan atas seseorang.²⁰

3. Memiliki dasar moral yang kuat

Sosialisme tidak hanya kemanusiaan saja tetapi juga ketuhanan. Dengan sosialisme religious berarti tidak hanya memikirkan kebahagiaan didunia saja tetapi juga dalam kehidupan lebih kekal di akhirat. Karena dasar moral yang kuat itu, diharapkan tidak mudah terjerumus dalam lembah metode kerja yang menghalalkan segala macam cara.²¹

4. Tidak bersikap boros

¹⁸ Roro Fathikin, "Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an dan Pancasila, *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol.1, No.2 (2017), 305.

¹⁹ Nurcholis Madjid, *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 2008), 246.

²⁰ Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 2013), 156.

²¹ Ibid

Dalam hal ini masyarakat Indonesia diharapkan tidak memakai atau mengeluarkan uang, barang, dan sumber daya secara berlebihan. Karena hidup boros dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu harus dengan timbang rasa begitu rupa sehingga tidak menyinggung rasa keadilan umum.²²

KESIMPULAN

Dalam era yang terus berkembang ini, aktualisasi nilai-nilai Pancasila merupakan tugas penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Melalui pemikiran dan kontribusi Nurcholish Madjid, kita mendapatkan wawasan yang berharga tentang pentingnya menghidupkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Nurcholish Madjid mengajarkan kepada kita bahwa Pancasila adalah jembatan yang menghubungkan perbedaan dan menghormati pluralitas yang ada dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, demokrasi, dan kerukunan, tidak hanya menjadi aspek penting dalam membangun negara yang adil dan beradab, tetapi juga relevan dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama dan antarbudaya.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila menurut Cak Nur juga menuntut partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Setiap individu memiliki peran penting dalam memupuk semangat inklusivitas, dialog, dan musyawarah, serta menciptakan lingkungan yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebagai masyarakat yang hidup di era teknologi dan globalisasi, pemikiran Nurcholish Madjid mengajarkan kita tentang pentingnya pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Pendidikan yang berkualitas dan holistik dapat membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman yang kuat tentang toleransi, persatuan, dan semangat kebangsaan. Dengan demikian, kita dapat menjaga keberlanjutan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan dan perubahan zaman.

Melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila, kita dapat membangun kehidupan berbangsa yang berkeadilan, beradab, dan sejahtera. Dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan, serta menghadapi berbagai tantangan yang ada, pemikiran Nurcholish Madjid memberikan arahan dan inspirasi yang berharga. Kontribusinya dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan nilai-nilai Pancasila menunjukkan bahwa harmoni antara agama dan negara adalah mungkin dan diperlukan dalam mencapai tujuan bersama.

Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi Nurcholish Madjid tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Mari bersama-sama mengedepankan semangat inklusivitas, toleransi, dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari, di tempat kerja, di komunitas, dan di ranah publik. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang bermartabat, maju, dan tetap menghormati keberagaman sebagai kekayaan bangsa. Momentum aktualisasi nilai-nilai Pancasila menurut Nurcholish Madjid memberikan inspirasi bagi kita untuk terus melangkah maju menuju peradaban yang lebih baik. Mari kita jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam segala aspek kehidupan kita, sehingga kita dapat mewujudkan cita-cita bersama sebagai bangsa yang besar. Dengan demikian, kita

²² Ibid.

akan membangun Indonesia yang berwawasan, inklusif, dan damai, menghormati hak asasi manusia, memajukan kesejahteraan, serta menjadi pemain utama di tingkat regional maupun global.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathikin, Roro, "Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an dan Pancasila, *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol.1, No.2, 2017.
- Hidayat, Komaruddin. "Kata Pengantar" dalam Nurcholis Madjid, *Islam Agama peradaban Membangun Makna dan Relevansi Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.
- Kuntowijoyo, dkk. *Begawan Jadi Capres: Cak Nur Menuju Istana*. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Madid, Nurcholis. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1993.
- Madjid, Nurcholis, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1999), 198.
- Madjid, Nurcholis, *Indonesia Kita*. Jakarta: Paraamadina, 2004.
- Madjid, Nurcholis, *Tradisi Islam Peran dan Fungsinyadalam Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 2008.
- Madjid, Nurcholis. *Islam dan Kemodernan*. Bandung: Mizan, 1993.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet. I, Jakarta: Paramadina, 2008
- Madjid, Nurcholis. *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Nadroh, Siti. *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholis Madjid*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rahman, Budhy Munawar. *Karya Lengkap Nurcolis Madjid*, Cet. I, Jakarta: NCSM, 2019
- Rahman, Fazlur. *Metode dan Alternatif Neo Modernisme Islam*. Bandung: Mizan, 1992.
- Saridjo, Marwan. *Cak Nur: di Antara Sarung dan Dasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab*. Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2005.
- Sulbi, "Islam Kemodernan dan Keadilan Sosial dalam Pandangan Nurcholis Madjid", *Journal of Social Religion Research*, Vol. 6, No. 1, April 2021.
- Syah, Sofian, "Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Raden Intan, Lampung, 2019).
- Taufik, Akhmad. *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Weruin, Urbanus Ura, "Keadilan Sosial dan Demokrasi," dalam *Jurna Hukum*, Vol. 3, No. 12, 1997.
- Wiwin, "Makna Simbolik Zakat dalam Prespektif Nurcholis Madjid," dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 9, No. 3, 2016.
- Zamharir, Muhammad Hari. *Agama dan Negar: Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholis Madjid*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.